



PENGALIHAN UANG BATUBARA INDONESIA

Bagaimana sejumlah besar uang
batu bara dipindahkan ke lepas
pantai dan menghilang

Bagian 3: Jaringan Luar Negeri Milik Adaro

PENGALIHAN UANG BATU BARA

INDONESIA, BAGIAN 3: JARINGAN

LUAR NEGERI MILIK ADARO

Ini adalah terjemahan Bahasa Indonesia dari laporan "Taxing Times For Adaro", yang aslinya diterbitkan dalam bahasa Inggris pada 4 Juli. Jika terdapat perbedaan atau kurang jelas, mohon gunakan versi asli yaitu dalam Bahasa Inggris.

Ini adalah edisi ketiga dari serangkaian laporan yang mengungkapkan temuan-temuan dari penyelidikan kami terhadap industri batubara Indonesia. Di dalam laporan ini kami mengungkapkan, bagaimana Adaro, sebuah perusahaan besar batubara Indonesia, telah menyembunyikan keuntungan dalam jumlah besar ke jejaring perusahaan luar negeri (*offshore network*), dan bagaimana jejaring ini bertambah besar. Ini menunjukkan bagaimana aktivitas tersebut bertentangan dengan citra perusahaan yang mereka banggakan, terkait sumbangan mereka kepada bangsa Indonesia, dan yang lebih penting lagi, mempertanyakan apakah struktur perusahaan luar negeri ini membantu Adaro memperkecil jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia.

Batu-bara adalah sumber energi yang kontroversial. Di seluruh dunia, batu-bara semakin dipandang sebagai sektor yang berbiaya dan berisiko tinggi; sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi krisis iklim, sumber polusi udara yang mematikan dan penyebab dari banyak jenis kerusakan lingkungan lainnya.

Semakin banyak negara yang mulai meninggalkan batu bara. Biaya reputasi yang muncul karena mendukung batu-bara di seluruh dunia, menyebabkan semakin banyak pihak-pihak yang mendanai sektor

ini pergi meninggalkannya. Bank, perusahaan asuransi atau pemberi pinjaman sekarang mengumumkan larangan-larangan baru, hampir rata-rata setiap dua minggu.¹

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batu-bara terbesar di dunia. Dengan permintaan global batu-bara menurun secara signifikan, maka sejumlah rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga batu-bara baru di Indonesia dapat membantu untuk mempertahankan pasar batu-bara Indonesia.

Namun di Indonesia batu-bara juga dilihat sebagai sesuatu yang semakin kontroversial. Skandal korupsi baru-baru ini, ditambah dengan serangkaian izin yang dikeluarkan dengan tidak benar, pencemaran permukaan tanah dan air, dan ketergantungan yang semakin besar kepada subsidi pemerintah, dan sejumlah masalah lain, menciptakan perlawanan yang semakin besar kepada industri ini.

Temuan kami sebelumnya di dalam penyelidikan multi-bagian ini memberi alasan tambahan mengapa Pemerintah Indonesia, bank internasional dan penanam modal harus menghindari sektor batu bara Indonesia: karena mereka dapat kehilangan uang serta reputasi mereka. Laporan kali ini akan menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia dapat kehilangan pendapatannya akibat praktik-praktik luar negeri dari salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia.

JARINGAN LUAR NEGERI MILIK ADARO

Adaro Energy, salah satu perusahaan batu-bara terbesar di Indonesia, baru-baru ini memperluas jaringan perusahaan luar negerinya ke Singapura dan Mauritius, yang berperan mengumpulkan sebagian keuntungan dari perdagangan batu-bara dan di saat yang sama juga mengelola investasi mereka di tambang batu-bara di Australia.

Penggunaan suaka pajak untuk menyimpan dana dan aset, meningkatkan risiko di mana ratusan juta dolar yang disimpan Adaro di luar negeri, mungkin tidak akan pernah dikenakan pajak di Indonesia. Penghindaran pajak biasanya tidak ilegal, namun hal itu semakin tidak diizinkan di seluruh dunia

karena dapat secara signifikan mengurangi jumlah pendapatan yang pemerintah kumpulkan, yang sebenarnya dapat dibelanjakan untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara mereka.

Pada saat mereka memperluas jaringan di luar negeri, Adaro juga menerima keuntungan dari jaminan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia atas pembangkit listrik tenaga batu bara Batang yang bernilai 4 miliar dolar AS, yang akan menjadi yang terbesar di Indonesia, di mana Adaro adalah salah satu mitra di dalam proyek patungan (*joint venture*) ini, dengan kepemilikan 34 persen. Adaro memperkirakan usaha patungan ini akan menghasilkan pendapatan hingga 80 juta dolar AS per bulanketika mulai beroperasi. Ini berarti, sebenarnya, Adaro mengandalkan pemerintah (dan warga Indonesia) untuk memberikan jaminan kepada salah satu sumber keuntungan masa depannya, sementara, pada waktu yang sama, memanfaatkan jejaring perusahaan luar negerinya untuk mengurangi potensi pembayaran pajak di Indonesia.

Adaro Energy, salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, kerap mengeluarkan catatan-catatan inspiratif di dalam beberapa pesan publiknya. Presiden Direktur Adaro, Garibaldi Thohir, yang juga merupakan investor di Adaro, memberikan komentar dalam wawancara tahun 2017: "kita punya satu keyakinan bahwa bangsa Indonesia bisa mengelola aset-aset natural resources yang ada. Kita sebagai pengusaha nasional, pengusaha Indonesia ingin memberikan kontribusi lebih."² Di dalam beberapa pernyataan publiknya, Adaro sangat "menekankan" "komitmen mereka kepada bangsa Indonesia" melalui pajak yang mereka bayarkan dan juga kontribusi lainnya."³ untuk memastikan bahwa

"sebagai perusahaan nasional, [Adaro] berkomitmen untuk berkontribusi kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia melalui pajak"⁴ dan Adaro juga bercita-cita untuk memberikan "dukungan penuh bagi kemajuan bangsa Indonesia".⁵



Tampak dari atas tambang batu bara Tutupan milik Adaro di Kalimantan Selatan
©REUTERS/Matthew Bigg

Adaro membayar pajak yang sangat besar di Indonesia dan anak perusahaannya, Adaro Indonesia, baru-baru ini menerima penghargaan status "pembayar pajak kategori emas" dari Kementerian Keuangan. Namun, Global Witness telah mempelajari bahwa Adaro juga telah mengikuti praktik banyak perusahaan multinasional Barat dengan mengalihkan pendapatan ke dan memegang aset di dalam negara suaka pajak yang bisa membantu mereka untuk menghindari atau meminimalisir pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia.⁶

Penghindaran pajak adalah masalah yang sudah diketahui umum di Indonesia, di mana persentase pajak yang dipungut sangat kecil dibandingkan standar internasional.⁷ Diketahui bahwa sejumlah besar uang mengalir keluar negeri dan masuk ke dalam suaka pajak. Berdasarkan amnesti pajak tahun 2016 dan 2017, perusahaan dan

individu kaya di Indonesia telah membuka aset-asetnya, dengan nilai total lebih dari US \$ 350 miliar, dan sekitar 25 persen dari asset itu disimpan di luar negeri.⁸

Sama seperti banyak perusahaan ekstraktif lain, Adaro memiliki anak perusahaan bidang pemasaran di Singapura. Anak perusahaan ini, Coaltrade Services International, membeli batu bara dari anak perusahaan Adaro lain yang tambangnya berada di Indonesia. Coaltrade juga membeli dari pihak ketiga, kemudian menjual batu bara dengan nilai yang sudah dinaikkan. Coaltrade juga bertindak sebagai agen penjualan untuk Adaro dan pihak ketiga, dan menerima komisi atas jasa tersebut.



Direktorat Jenderal Pajak | Directorate General of Taxation

Status Wajib Pajak (WP) Patuh

Direktorat Jenderal Pajak telah mengukuhkan status WP Patuh kepada anak perusahaan Adaro Group yakni PT Adaro Indonesia untuk periode 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2019. Untuk menjadi WP Patuh, WP harus memenuhi serangkaian kriteria aturan yang ketat, misalnya kepatuhan dalam pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk tiga tahun terakhir, dan WP tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir. Sebagai WP Patuh, PT Adaro Indonesia mendapatkan keistimewaan berupa pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak sebelum rampungnya pemeriksaan oleh kantor pajak.

Golden Taxpayer Status

Directorate General of Taxation has issued a golden taxpayer status for Adaro Group's subsidiary PT Adaro Indonesia for the period of 1 January 2018 to 31 December 2019. In order to be qualified as a golden taxpayer, taxpayers must fulfil a set of strict statutory criteria such as the compliance in tax return submission, tax payments and financial statements with unqualified opinion for the last three years, and such taxpayer never convicted in doing tax criminal act for the last five years. As such, PT Adaro Indonesia may obtain privilege to receive tax refund prior to completion of tax office assessment.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memberikan penghargaan “Golden Taxpayer” kepada Direktur Adaro, Bapak Garibaldi Thohir. Diambil dari laporan tahunan Adaro tahun 2017.

Struktur seperti itu umum terjadi, tetapi ini dapat dipertanyakan apabila pengaturan penjualan dan pemasaran terlihat seperti digunakan untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi seperti Indonesia ke negara dengan pajak rendah seperti Singapura. Penghindaran pajak badan semakin tidak diizinkan, dan perusahaan yang ketahuan menghindari pajak, dalam keadaan tertentu, dapat dipaksa oleh otoritas pajak untuk membayar pajak tambahan, terkadang dengan bunga dan penalti.

Adaro mengungkapkan pada tahun 2008 bahwa kantor pajak di Indonesia telah menyimpulkan bahwa penjualan batu bara ke Coaltrade pada tahun 2004 dan 2005 dilakukan dengan harga yang lebih rendah. Adaro menjual batu bara ke Coaltrade dengan harga yang rendah kemudian Coaltrade menjualnya ke pihak ketiga dengan harga pasar yang lebih tinggi dan membukukan keuntungan yang dihasilkannya di Singapura yang memiliki pajak yang lebih rendah daripada di Indonesia. Kantor pajak di Indonesia menyimpulkan bahwa Adaro telah

melakukan "penyesuaian harga transfer" dan Adaro perlu menghitung ulang harga batu bara yang dijual ke Coaltrade serta membayar tambahan pajak di Indonesia berdasarkan kenaikan keuntungan yang didapatkannya. Adaro melaporkan bahwa akibat hal ini, mereka telah membayar tambahan pajak sebesar 33,2 juta dolar AS pada tahun 2008 untuk menyelesaikan masalah ini.⁹

Rekening Coaltrade yang dianalisis oleh Global Witness menunjukkan bahwa kenaikan yang dibuat ketika membeli dan menjual batu bara telah turun dari rata-rata sekitar 15 persen, sebelum intervensi dari kantor pajak, ke sekitar 4 persen sesudah intervensi yang dilakukan kantor pajak.¹⁰ Dengan kata lain, lebih sedikit keuntungan dari penjualan batu bara yang dibukukan di Singapura, daripada di Indonesia. Namun demikian, batu bara mulai menghasilkan lebih banyak uang daripada sumber lain yaitu komisi yang diperoleh dari menjual batu bara yang ditambang di Indonesia kepada anak perusahaan Adaro lainnya,

yang berbasis di Indonesia, juga komisi dari pihak ketiga.

Rekening Coaltrade menunjukkan bahwa dalam tiga tahun sebelum 2009, Coaltrade memperoleh komisi sekitar 4 juta dolar AS per tahun, secara rata-rata. Meskipun demikian, antara 2009 dan 2017 Coaltrade memperoleh hampir 55 juta dolar AS per tahun dari komisi, secara rata-rata, atau jumlah total sebesar 490, 5 juta dolar AS. Komisi ini berkontribusi kepada total keuntungan sebelum pajak, setelah pendapatan dan biaya lainnya, sebesar 416,8 juta dolar AS dari tahun 2009 sampai dengan 2017.¹¹ Global Witness bertanya secara merinci kepada Adaro bagaimana mereka menghitung nilai komisi ini, tetapi mereka tidak memberikan jawaban.¹²

Berdasarkan laporan keuangannya, keuntungan Coaltrade yang dikenakan pajak di Singapura di periode ini pada tingkat rata-

rata tahunan adalah sebesar 10.7 persen. Ini jauh lebih rendah dari tingkat rata-rata tahunan yang Adaro bayarkan atas keuntungannya di Indonesia, yaitu sebesar 50.8 persen.¹³ Lebih dari 70 persen batu bara yang dijual oleh Coaltrade antara tahun 2009-2017 berasal dari anak perusahaan pertambangan batu bara Adaro yang berada di Indonesia.¹⁴ Jika komisi untuk menjual batu bara Indonesia milik Adaro dikenakan pajak di Indonesia pada tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi, daripada yang dikenakan pajak di Singapura, maka Indonesia akan mengumpulkan hingga 125 juta dolar AS tambahan dari pajak penghasilan perusahaan antara tahun 2009 dan 2017, atau hampir 14 juta dolar AS per tahunnya.¹⁵ Global Witness meminta Adaro untuk memberikan komentar, namun tak menerima balasan.

JARINGAN LUAR NEGERI MILIK ADARO: Memindahkan keuntungan dalam jumlah yang besar keluar dari Indonesia (2009-2017)



Ada alasan tak terkait pajak yang menjelaskan operasi pemasaran batu bara harus berbasis di Singapura yaitu karena Singapura sudah menjadi pusat perdagangan komoditas. Namun, kesenjangan yang sangat besar antara tingkat pajak Adaro di Indonesia dan tingkat pajak Coaltrade di Singapura membuat masuk akal untuk berpikir bahwa pembayaran komisi dari batu bara yang ditambah dari Indonesia ini, dilakukan untuk memastikan lebih banyak keuntungan yang dibukukan di Singapura, dan bukan di Indonesia, di mana mereka harus membayar pajak lebih tinggi. Dengan demikian, sangat mungkin hal ini akan memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan Adaro di Indonesia.

Global Witness meminta Adaro untuk berkomentar bahwa apabila mereka tidak melakukan pengaturan bisnisnya sedemikian rupa, maka Pemerintah Indonesia dapat mengenakan pajak yang jauh lebih tinggi kepada mereka, dan juga ingin menanyakan apakah Adaro menerima putusan pajak atau petunjuk lain dari otoritas pajak Indonesia, yang menunjukkan bahwa Indonesia telah menyetujui tingkat dan cakupan komisi yang dibayarkan kepada Coaltrade. Namun Adaro tidak memberikan jawaban kepada semua pernyataan ini.¹⁶

Otoritas pajak negara lain mempermasalahakan bagaimana Singapura digunakan sebagai pusat penjualan dan pemasaran. Dua perusahaan ekstraktif raksasa dari Australia, BHP Billiton dan Rio Tinto, telah dipertanyakan oleh otoritas pajak Australia terkait dengan keuntungan yang mereka bukukan di Singapura.

BHP menyatakan pada bulan November 2018 bahwa mereka telah membayar 529 juta dolar Australia (kira-kira 374 juta dolar

AS) tambahan pajak untuk menyelesaikan sengketa ini, tanpa harus mengaku kalau mereka melakukan praktik penghindaran pajak.¹⁷ Rio Tinto telah mengalokasikan 380 juta dolar AS dalam bentuk provisi – uang yang mungkin harus dibayarkan belakangan – dan sebagian atau seluruh uang ini terkait dengan sengketa pajak di Australia yang sedang berlangsung.¹⁸

ADARO MELANGKAH LEBIH JAUH LAGI KE LUAR NEGERI

Keuntungan Coaltrade yang berada di Singapura kemudian mengalir lebih jauh lagi ke luar negeri, ke suaka pajak yang berada di Samudra Hindia, yaitu ke Mauritius.

Adaro saat ini menguasai sekelompok perusahaan-perusahaan luar negeri yang memiliki aset bernilai hampir 1 miliar dolar AS.¹⁹ Kelompok ini terdiri dari Arindo Holdings di Mauritius, yang memiliki Vindoor Investments di Mauritius, yang juga memiliki Coaltrade di Singapura. Kelompok perusahaan ini hanya memiliki 22 pegawai terhitung sejak pertengahan tahun 2017, sebagian besar telah bekerja untuk Coaltrade, yang mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut dibentuk hanya untuk menyimpan aset dan dana, alih-alih melakukan fungsi jasa atau fungsi lainnya yang membutuhkan sumber daya manusia.²⁰

Antara tahun 2009 dan 2017 lebih dari 90 persen keuntungan bersih Coaltrade, sejumlah 338.5 juta dolar AS, dibayarkan dalam bentuk dividen kepada Vindoor.²¹ Tidaklah jelas ke mana aliran dana ini pada akhirnya akan berakhir setelah dibayarkan kepada Vindoor, karena Vindoor tidak mengumumkan rekeningnya dan tidak semua rekening Arindo Holdings tersedia secara online (perusahaan tidak diwajibkan

untuk mengeluarkan setiap atau seluruh rekening mereka yang ada di Mauritius). Perusahaan-perusahaan tersebut tampaknya tidak membayar pajak di Mauritius hingga setidaknya pada bulan September 2017, setelah Arindo mengubah status mereka di bawah hukum perusahaan setempat, agar dapat menggalang modal dan terdaftar di bursa saham Mauritius, dan dan nampaknya sekarang akan dikenakan pajak maksimum 3%.²²



Mauritius, Negara yang terletak di Samudera Hindia, menjadi lokasi di mana Adaro Energy mendirikan dua anak perusahaan yang merupakan bagian dari jaringan luar negerinya © DeAgostini/ Getty Images

Arindo Holdings tampaknya tidak membayar dividen apa pun kepada Adaro sejak tahun 2015, yang menyiratkan bahwa keuntungan yang didapat dari Coaltrade tetap berada di luar negeri dan tidak mengalir kembali dan dikenakan pajak di Indonesia.²³ Ketika Global Witness menanyakan apakah seperti itu situasinya, Adaro tidak memberikan konfirmasi atau menyangkalnya.

Pada tahun 2017 sebuah perusahaan ditambahkan ke dalam kelompok perusahaan-perusahaan luar negeri ini yaitu Adaro Capital yang berada di suaka pajak Malaysia, tepatnya di Labuan. Coaltrade melaporkan bahwa mereka membayar 31 juta dolar AS tunai untuk memperoleh Adaro Capital namun bukan pihak yang mana perusahaan itu diperoleh.²⁴ Menurut laporan

Arindo Holdings, Adaro Capital akan “hanya melakukan kegiatan perbendaharaan untuk investasi di dalam instrumen-instrumen keuangan,” dan berniat untuk “memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemasukan Adaro Group.”²⁵ Dengan kata lain, perusahaan ini akan melakukan investasi bagi Adaro, yang memilih untuk melakukan aktivitas ini dari lokasi suaka pajak dan bukan di Indonesia. Global Witness bertanya kepada Adaro, apakah salah satu tujuan utama mendirikan perusahaan di Labuan adalah untuk menghindari pajak di Indonesia, namun mereka tidak memberikan tanggapan.

Anak perusahaan Adaro di Labuan, Adaro Capital, saat ini memiliki sebagian tambang batu bara Kestrel di Australia. Pada Maret 2017, Adaro Capital bersama-sama mengakuisisi 80% saham Rio Tinto di tambang ini, bersama dengan satu mitra investor dengan nilai 2.25 miliar dolar AS.²⁶

Pemilik aset ini dan aset luar negeri potensial kedepannya dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk khawatir. Merupakan sesuatu yang lazim untuk aset pertambangan dimiliki oleh perusahaan holding di dalam negara suaka pajak dan ini sering kali dapat menjamin pemilik akhir perusahaan membayar lebih sedikit pajak di negara asalnya atas keuntungan yang diperoleh oleh sebuah aset atau atas *capital gains* ketika asetnya dijual. Global Witness menanyakan Adaro apakah mereka berencana untuk membayar pajak Indonesia atas setiap keuntungan atau *capital gains* dari Kestrel. Namun Adaro tidak memberikan tanggapan.

Sebagai kesimpulan, Adaro telah memperoleh keuntungan yang besar dari perdagangan batu bara yang ditambang di Indonesia dengan membukukan keuntungan

di negara dengan pajak yang rendah, di Singapura, dan memindahkan keuntungan ini ke perusahaan-perusahaan terhubung di Mauritius yang tidak dikenakan pajak hingga 2017/18. Apabila kegiatan-kegiatan bisnis ini dilakukan di Indonesia dan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat yang sama dengan perusahaan induknya, Indonesia dapat memungut 125 juta dolar AS dalam bentuk pajak perusahaan antara tahun 2017 dan 2019. Jaringan perusahaan-perusahaan luar negeri milik Adaro juga telah bertumbuh dalam ukuran. Adaro telah membangun dan memelihara anak perusahaan di Labuan, yurisdiksi dengan pajak rendah, dan perusahaan itu kini memegang sebagian besar investasi mereka di Australia.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah salah satu alasan utama dari aktivitas di Singapura dan pendirian dan pemeliharaan anak Perusahaan di Labuan dan Mauritius dilakukan untuk menghindari pajak yang seharusnya dapat dibayarkan di Indonesia. Global Witness menanyakan hal ini kepada Adaro, namun, Adaro memilih untuk tidak memberikan konfirmasi atau menyangkal ini.

REKOMENDASI

Permasalahan krisis iklim dan polusi udara dari batu bara telah menggiring banyak negara di seluruh dunia untuk menolak batu bara, dan semakin banyak yang mengumumkan akan mengurangi atau bahkan benar-benar menghapusnya ketergantungan dari batu bara. Aksi pemerintahan seperti ini ditambah risiko reputasi lainnya terkait batubara, telah mempercepat bank dan lembaga keuangan lainnya untuk berhenti membiayai industri batu bara.

Pada bulan Februari 2019, *Institute for Energy Economics and Financial Analysis* mengeluarkan sebuah kajian yang menunjukkan bahwa industri keuangan global “melarikan diri dari sektor batu bara secara besar-besaran,” di mana lebih dari seratus lembaga keuangan global yang meninggalkan batu bara, dan bank, perusahaan asuransi atau pemberi pinjaman mengumumkan larangan baru, rata-rata setiap dua minggu.

Temuan di dalam laporan ini menawarkan satu lagi alasan mengapa pemerintah wan warga negara Indonesia seharusnya khawatir dengan rencana untuk memperluas industri ini dengan membangun banyak pembangkit listrik tenaga batu bara. Pada waktu yang sama, di saat salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia sedang bersiap untuk menerima dukungan dari jaminan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara terbesar di negara ini, perusahaan yang sama membentuk struktur jaringan perusahaan luar negeri yang kemungkinan besar dilakukan untuk mengurangi keuntungan yang dapat dikenakan pajak oleh Indonesia.

Secara khusus, Global Witness merekomendasikan:

PEMERINTAH INDONESIA PERLU:

1. Mengkonfirmasi seluruh hal yang diangkat di dalam laporan ini kepada otoritas pajak Indonesia untuk dikaji lebih lanjut.
2. Menurunkan secara drastis jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara yang direncanakan di dalam RUPTL. Kebijakan ini harus dikaji dan diumumkan secepat mungkin dan diterapkan pada tahun 2020 ketika pembaruan RUPTL dilakukan.

3. Menyusun sebuah rencana komprehensif untuk transisi energi meninggalkan batu bara di Indonesia, sejalan dengan Tujuan Kesepakatan Paris, yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia ini.

**BANK MILIKI PEMERINTAH DAN SWASTA
DI SELURUH DUNIA HARUS MENGADOPSI
KEBIJAKAN BATUBARA YANG:**

1. Tidak memberikan pembiayaan proyek bagi program pengembangan tambang batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di Indonesia.
2. Tidak memberikan pembiayaan umum dan layanan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang sangat dan terlalu bergantung kepada energi yang berasal dari batu bara.²⁷
3. Mengakhiri kerjasama mereka dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang terlibat dengan batu bara, menciptakan rencana dengan tenggat yang jelas untuk mencapai ini.

www.globalwitness.org

¹ Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). "Setiap dua minggu sebuah bank, perusahaan asuransi atau Lender mengumumkan larangan batu bara yang baru, 26 Februari 2019.

² Detikfinance, Kisah Boy Thohir caplok Adaro dari tangan asing, 4 April 2017.

³ 2019 "Surat dari Direksi," 15 April 2019, www.adaro.com

⁴ Rilis pers "Apresiasi dan Penghargaan Bagi Pembayar Pajak 2019 (Maret 2019)", www.adaro.com

⁵ PT Adaro Energy Tbk, Laporan Tahunan 2017, hal. 37.

⁶ Untuk memenuhi syarat sebagai "pembayar pajak kategori emas" sebuah perusahaan harus: i) melaporkan pajak secara tepat waktu; ii) tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali ketika mereka memiliki izin untuk membayar pajak dengan sistem angsuran atau untuk pajak yang telah ditunda; iii) laporan keuangannya telah diaudit dan mendapatkan status wajar tanpa pengecualian dalam tiga tahun terakhir; dan tidak pernah dihukum atas kejahatan pajak selama lima tahun terakhir. Lihat PricewaterhouseCoopers "Tax Indonesia/April2018/ No.05 Peraturan Baru tentang Pengembalian Pajak Awal", dan Laporan Akhir PT Adaro Energy Tbk. Untuk tahun 2017. hal. 37.

⁷ Bank Dunia. Kerangka Kemitraan Negara bagi Republik Indonesia, Untuk periode TF16-TF20. 3 November 2015, hal. 38. Rasio pajak terhadap PDB pada waktu itu adalah 10.9 persen.

⁸ The Economist, "Program Amnesti Pajak Indonesia telah melewati tenggat waktunya" 30 Maret 2017. Indonesia-Investments.com, "Program Amnesti Pajak Indonesia telah Berakhir, Apa saja hasilnya?"

⁹ Adaro Energy, "Prospektus untuk pendaftaran saham perdana" 4 Juli 2008, HAL. 71.

¹⁰ Analisis Global Witness analysis atas laporan keuangan Coaltrade dari 2007 hingga 2017. Yang mana tahun 2017 adalah tahun paling baru untuk laporan keuangan, yang mana tersedia pada tanggal 22 Mei 2019. Walaupun Adaro Energy telah menerbitkan laporan keuangan 218 mereka, namun Coaltrade belum.

¹¹ Ibid.

¹² Surat untuk Adaro dari Global Witness. 6 August 2018 and 19 Februari 2019.

¹³ Analisis Global Witness atas Coaltrade dan Laporan Keuangan Adaro dari 2009 hingga 2017.

¹⁴ Antara 2019 dan 2017, persentase batu bara yang terjual oleh Coaltrade antara 2009 and 2017 adalah 72.8% dari anak perusahaan Adaro dan 25.5% dari pihak ke-tiga. Laporan keuangan Adaro dari tahun 2009 sampai dengan 2017.

¹⁵ Laporan keuangan Coaltrade's menunjukkan bahwa Adaro telah membayar total 42.2 juta dolar AS untuk pajak di Singapura antara Tahun 2009 dan 2017 (Inkusif) atas laba sebelum pajak sebesar 416.8 juta dolar AS. Global Witness telah menghitung berapa nilai pajak yang seharusnya dapat dibayarkan kepada Indonesia dengan tingkat laba yang sama, dan dengan tingkat pajak yang sama yang dibayarkan Adaro atas laba yang didapatkan dari Indonesia pada periode waktu yang sama yaitu 50.8%.

¹⁶ Ibid. 12.

¹⁷ BHP, "BHP membayar sengketa harga transfer yang telah berkepanjangan." 19 November 2018, Media rilis. Nilai tukar antara Australian dan US diambil dari riwayat sejak November 2018 pada www.xe.com

¹⁸ Rio Tinto, Laporan tahunan 2017, Catatan 9b.

¹⁹ Arindo Holdings (Mauritius) Limited, abridged unaudited financial statements for the quarter ended 30th September 2018.

²⁰ Arindo Holdings, "Mendaftarkan keterangan rinci", 30th November 2017, hal.8 dan hal.26.

²¹ Analisis Global Witness terhadap laporan keuangan Coaltrade dari tahun 2009 hingga 2017.

²² Ibid. 20, Catatan Laporan Keuangan, Catatan 17. Arindo mengubah statusnya di Mauritius pada September 2017 dari Perusahaan Bisnis Global Kategori 2, yang mana tidak perlu membayar pajak, ke Perusahaan Bisnis Global Kategori 1 yang mana dikenakan pajak maksimum 3% atas dividen dan capital gains, Arindo Holdings, "Laporan Keuangan Ringkas 2017" hal. 2, Latar Belakang. Alasan yang diberikan untuk mengubah statusnya adalah untuk menggiring modal di Mauritius, hal.7.

²³ Ibid. P.14. Arindo Holdings. Laporan Keuangan Ringkas yang belum diaudit untuk kuartal yang berakhir pada tanggal 30 September 2018.

²⁴ Coaltrade. Laporan Keuangan 2017. Catatan 14.

²⁵ Arindo Holdings, "Mendaftarkan keterangan rinci", hal. 10.

²⁶ Arindo Holdings. Pemberitahuan atas kesepakatan perikatan terkait dengan akuisisi 80 saham Rio Tinto di tambang batu bara kokas di Kestrel. 29 Maret 2018.

²⁷ Perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung kepada batu bara didefinisikan sebagai para perusahaan yang mana lebih dari 30% pendapatan dari bauran energi mereka berasal dari batu bara; dan/atau produksi tahunan, perdagangan, atau konsumsi batu bara-nya mencapai 20 juta ton setiap tahunnya ; dan atau kapasitas terpasangnya di atas 10,000 MW; dan/atau perusahaan berencana untuk melakukan investasi ke dalam infrastruktur terkait batu bara. Kriteria tersebut dirancang untuk memastikan adanya perusahaan-perusahaan yang sangat beragam, yang dapat jatuh di bawah ambang batas 30% namun memiliki paparan absolut kepada batu bara yang besar.